

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK**  
**BANJIR TAHUN 2021 DI KELURAHAN MEKAR JAYA**  
**KABUPATEN SINTANG**



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**  
**Kajian Kebijakan Publik**

**Oleh:**

**Flonia Sevaeviani**

**Nim. E1011191052**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**PONTIANAK**

**2025**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK**  
**BANJIR TAHUN 2021 DI KELURAHAN MEKAR JAYA**  
**KABUPATEN SINTANG**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK  
BANJIR TAHUN 2021 DI KELURAHAN MEKAR JAYA  
KABUPATEN SINTANG**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Flonia Sevaeviani  
Nim. E1011191052

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Julia Magdalena W, M.Si  
NIP. 196209291989032001

Tanggal : .....

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si  
NIP. 197611302003122001

Tanggal:.....

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK  
BANJIR TAHUN 2021 DI KELURAHAN MEKAR JAYA  
KABUPATEN SINTANG**

Oleh :

**Flonia Sevaeviani**  
**Nim.E1011191052**

Dipertahankan Di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : 24 Maret 2025  
Waktu : 13.00-15.00 WIB  
Tempat : Ruang 2

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Julia Magdalena W. M.Si  
NIP. 196209291989032001

Dr. Ira Patriani. S.IP, M.Si  
NIP. 197611302003122001

**Penguji Pertama**

**Penguji Kedua**

Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si  
NIP.196905021998022001

Dr. Erdi, M. Si.  
NIP. 19670727202005011001

Mengetahui  
Dekan FISIP UNTAN,

Dr. Herlan, M. Si  
NIP.197205212006041001

## ABSTRAK

Flonia Sevaeviani, 2025. Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang. Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Mekar Jaya, Kabupaten Sintang pada tahun 2021 menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga diperlukan respons kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini membahas implementasi kebijakan BPBD dalam penanganan masyarakat terdampak banjir, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sintang telah menjalankan berbagai program tanggap darurat, seperti distribusi bantuan logistik, evakuasi warga dari wilayah berisiko tinggi, dan penyediaan tempat pengungsian yang memenuhi kebutuhan dasar. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya sarana dan prasarana seperti perahu evakuasi dan sistem komunikasi yang memadai, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal. Peneliti menyarankan agar BPBD lebih memaksimalkan sosialisasi di wilayah rawan, melibatkan sektor swasta dan LSM, serta menyediakan panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi bencana.

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPBD, Banjir, Kota Sintang*

## **ABSTRACT**

*Flonia Sevaeviani, 2025. Implementation of Regional Disaster Management Agency Policy for Flood-Affected Communities in Mekar Jaya Village, Sintang Regency. Thesis, Public Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*

*The flood disaster that occurred in Mekar Jaya Village, Sintang Regency in 2021 had a significant impact on the community, so an effective policy response is needed from the local government through the Regional Disaster Management Agency (BPBD). This study discusses the implementation of BPBD policies in handling flood-affected communities, referring to the theory of policy implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study show that the Sintang Regency BPBD has implemented various emergency response programs, such as distributing logistical assistance, evacuating residents from high-risk areas, and providing refugee camps that meet basic needs. However, the implementation of this policy still faces a number of obstacles, including limited trained human resources, lack of facilities and infrastructure such as evacuation boats and adequate communication systems, and weak coordination between related parties, including local governments, NGOs, and local communities. The researcher suggests that BPBD maximize socialization in vulnerable areas, involve the private sector and NGOs, and provide practical guidance for the community in dealing with disasters*

*Keywords: Policy Implementation, BPBD, Flood, Sintang City*

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang*”. Judul ini dipilih karena peristiwa banjir besar di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 memberikan kesempatan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan BPBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Mekar Jaya, Kabupaten Sintang, pada tahun 2021, termasuk evaluasi efektivitas, hambatan, serta dampaknya terhadap pemulihan masyarakat pascabencana.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui & mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan cara menganalisis data yang terkumpul sesuai kondisi pada saat penelitian dilaksanakan.

Pendapat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat implementasi kebijakan publik dari Donald Van Meter Dan Carl Van Horn

(Agustino, 2019,133). Pendapat ini terdiri dari 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu, ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang telah melaksanakan berbagai program tanggap darurat dalam menghadapi banjir yang melanda masyarakat di Kabupaten Sintang khususnya di Kelurahan Mekar Jaya pada tahun 2021, seperti distribusi bantuan logistik yang meliputi kebutuhan pokok, evakuasi warga yang berada di wilayah berisiko tinggi, serta penyediaan tempat pengungsian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani situasi darurat, minimnya sarana dan prasarana penunjang seperti perahu evakuasi dan sistem komunikasi yang andal, serta kurangnya sinergi dan koordinasi yang optimal antara berbagai pihak, baik dari tingkat pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, hingga komunitas masyarakat lokal.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu memperkuat alokasi anggaran bencana secara konsisten dan berkelanjutan. BPBD harus menetapkan mekanisme transisi organisasi yang

jelas, mengembangkan sistem informasi kebencanaan berbasis data, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan komunitas. Selain itu, pembangunan jaringan relawan, perbaikan sarana evakuasi, serta evaluasi pascabencana wajib dilakukan secara terstruktur. Kolaborasi dengan swasta, LSM, dan perguruan tinggi juga perlu diperluas untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.

Kedua, BPBD Kabupaten Sintang perlu memperkuat kapasitas anggaran, sarana, dan SDM untuk memastikan efektivitas mitigasi banjir. Mekanisme kerja harus fokus pada pencapaian tujuan melalui perencanaan realistis dan penggunaan sarana tepat guna, serta evaluasi berkala untuk memastikan dampak nyata dari implementasi kebijakan. Ketiga, Untuk mengatasi keterbatasan penanggulangan banjir di Kelurahan Mekar Jaya, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan menyeluruh, serta menyediakan sarana prasarana darurat. Kemitraan dengan swasta, lembaga donor, dan perguruan tinggi perlu diperluas, disertai perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase untuk mempercepat evakuasi dan distribusi.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Flonia Sevaeviani

Nomor Induk Mahasiswa : E1011191052

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Flonia Sevaeviani

NIM. E1011191052

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu:  
“Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau”

(Yesaya 5: 8-9)

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

(1 Korintus 10: 13)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan ucapan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat, berkat dan damai sejahtera yang selalu baru setiap hari sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis kasihi dan sayangi Bapak Yohanes Silas & Ibunda Maria Katarina yang telah menjadi orang tua luarbiasa bagi penulis, selalu sabar dan tak henti-hentinya selalu mendoakan, menyemangati, mendukung, memberikan kasih sayang kepada penulis sampai akhirnya penuli dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan motivasi nya, terima kasih juga sudah ada dan menjadi garda terdepan bagi penulis.

2. Kakak Kandung, Kurnelia, S.Pd. Abang Kandung, Flavianus Razak, A. Md. T. Abang Ipar, Apan Riswandi, S.Pd dan keponakan penulis Sagita Lia Panessa. Tiada hal yang paling penulis syukuri saat berkumpul bersama-sama dengan kalian, terima kasih sampai saat ini masih sabar dalam menghadapi penulis, terima kasih atas doa & semangat kalian selama ini. Maaf belum bisa jadi yang seperti kalian inginkan tapi saya akan selalu berusaha menjadi lebih baik bagi kalian semua.
3. Untuk teman-teman penulis Widiya, Hanna, Sonia, Imah, Diah, Hanna, Sefti, yang telah berjuang bersama dalam menyusun skripsi, saling mendoakan, saling memotivasi.
4. Flonia Sevaeviani sebagai hadiah untuk diri sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah meski jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Hidup kedepannya tidak ada yang tahu, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama mu dan memberikan mu kekuatan dalam percobaan-percobaanmu. Harus selalu semangat dan semoga engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, hikmat dan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Julia Magdalena Wuysang M.Si Selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini,

Semoga Tuhan selalu memberikan berkah dan kesehatan kepada kedua Dosen Pembimbing tercinta.

2. Ibu Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati M. Si selaku dosen penguji utama dan Bapak Dr. Erdi M.Si selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dosen – dosen dan staf administrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Kepada seluruh pegawai Kantor BPBD Kabupaten Sintang yang telah membantu penulis di dalam melakukan penelitian ini.
6. Kepada seluruh pegawai Kantor Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
7. Para informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Angkatan 2019, sama-sama berjuang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat kepada peneliti selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Segala bentuk kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis kiranya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Atas segala perhatiannya penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Pontianak, 11 Januari 2025

Flonia Sevaeviani

NIM.E1011191052

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Fokus Penelitian.....	16
1.4 Perumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian .....	16
1.6 Manfaat Penelitian .....	17
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	17
1.6.2 Manfaat Praktis .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA &amp; KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>18</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	18
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan .....	18
2.1.2 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	22
2.1.3 Konsep Mitigasi .....	24
2.1.4 Banjir Kabupaten Sintang Tahun 2021 .....	26

2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Proses Alur Pikir Penelitian .....	34
2.4 Pertanyaan Penelitian .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Langkah-Langkah Penelitian .....	39
3.3 Lokasi & Jadwal Penelitian.....	41
3.3.1 Lokasi Penelitian & Alasan Pemilihan Lokasi.....	41
3.3.2 Jadwal Penelitian.....	41
3.4 Subjek & Objek Penelitian.....	42
3.4.1 Subjek Penelitian.....	42
3.4.2 Objek Penelitian .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data .....	46
3.7 Analisis Data .....	48
3.7.1 Teknik Analisis Data.....	48
3.7.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat .....	51
4.1.1 letak wilayah .....	52
4.1.2 Iklim Dan Topografi .....	56
4.1.3 Penduduk.....	58
4.1.4 Gambaran Topografi & Potensi Kelurahan Mekar Jaya .....	59
4.2 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sintang.....	61
4.2.1 Visi Dan Misi Bpbd Kota Sintang .....	62
4.2.2 Tugas Pokok BPBD Kota Sintang .....	63
4.2.3 Struktur Jabatan BPBD Kota Sintang .....	67

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	69
5.1.1 Ketidakkonsistenan Kesiapsiagaan dan Respons BPBD Sintang dalam Penanganan Banjir Tahun 2021 .....	70
5.1.2 Upaya Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Sintang pada Tahun 2021 .....	71
5.1.3 Keterbatasan Sarana, SDM, dan Infrastruktur terhadap Penanggulangan Bencana di Kelurahan Mekar Jaya, Kabupaten Sintang pada Tahun 2021 .....	73
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	75
5.2.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan .....	75
5.1.2 Sumberdaya .....	78
5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana .....	83
5.1.4 Sikap/Kecenderungan ( <i>Dispotition</i> ) Para Pelaksana.....	86
5.1.5 Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana .....	88
5.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik.....	92
<b>BAB VI KESIMPULAN &amp; SARAN PENELITIAN.....</b>	<b>98</b>
6.1 Kesimpulan .....	98
6.2 Saran Penelitian.....	99
6.3 Keterbatasan Penelitian .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
Tabel 1. 1 Jumlah Korban Banjir di Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024 .....	5
Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Banjir .....	27
Tabel 2. 2 Penyebab Banjir .....	28
Tabel 2. 3 Dampak Banjir Bagi Masyarakat .....	29
Tabel 2. 4 Tabel Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Kecamatan di Kabupaten Sintang.....	55
Tabel 4. 2 Kelurahan di Kecamatan Sintang .....	56
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang .....	59
Tabel 4. 4 Potensi wilayah di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
Gambar 2. 1 Proses Alur Pikir Penelitian .....	35
Gambar 4. 1 Peta wilayah Kabupaten Sintang .....	53
Gambar 4. 2 Bagan Organisasi BPBD Sintang .....	68
Gambar 5. 1 Sosialisasi BPBD di Kelurahan Sungai Ana Kabupaten Sintang .....	76
Gambar 5. 3 Penyaluran Bantuan Pada Masyarakat Kelurahan Mekar Jaya .....	79
Gambar 5. 4 Data Sarana dan Prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Sintang .....	81
Gambar 5. 5 Bantuan Sarana dan Prasarana untuk BNPB Kabupaten Sintang .....	81
Gambar 5. 6 Satgas Gabungan BPBD Kabupaten Sintang .....	84
Gambar 5. 7 Rapat Pembentukan TRC Gabungan .....	91
Gambar 5. 8 Distribusi Bantuan oleh BPBD Jalur Darat .....	94
Gambar 5. 9 Distribusi Bantuan oleh BPBD Jalur Sungai .....	94

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	<i>halaman</i>
1. Daftar Subjek Penelitian.....	89
2. Panduan Wawancara.....	90
3. Dokumentasi.....	100
4. Surat Tugas Penelitian.....	101
5. Daftar Riwayat Hidup.....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik geografis rentan terhadap bencana banjir. Kondisi ini diperparah oleh letak geografisnya yang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Berada pada ketinggian 15-50 meter di atas permukaan laut (mdpl), Wilayah pesisir Kota Sintang, terutama di dataran rendah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi, termasuk dalam kategori daerah rendah sehingga rentan terhadap banjir. Curah hujan yang tinggi dalam periode tertentu dapat menyebabkan kedua sungai meluap. Selain curah hujan, banjir di Sintang diperparah oleh adanya banjir kiriman. Banjir di hulu Sungai Kapuas berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, sementara banjir di hulu Sungai Melawi berasal dari Kabupaten Melawi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui *website* <https://sintangkab.bps.go.id/id> Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang mempunyai luas sebesar 21.638 km<sup>2</sup>, terdapat 14 kecamatan dan 16 kelurahan serta 407 desa. Sebagai daerah yang mayoritas hutan tropis dan memiliki kelembaban udara cukup tinggi, Curah hujan mencapai 249,08 milimeter selama sebulan dengan rata-rata hujan sebanyak 17 hari selama sebulan.

Faktor penyebab banjir di Kabupaten Sintang adalah kondisi alam, penggunaan lahan yang tinggi & intensitas hujan yang berlangsung lama sehingga menyebabkan

meluapnya sungai Kapuas dan sungai Melawi ke pemukiman warga, serta rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) di kedua sungai tersebut. Muara kedalaman sungai Kapuas ketika tidak pasang berada di 7 meter dan ketika air pasang berada diantara 4 sampai 4,5 meter yang artinya daya tampung berkurang sehingga menyebabkan air turun lebih lama.

Adapun Kelurahan Mekar Jaya merupakan salah satu daerah yang rutin mengalami banjir di kota Sintang memiliki luas wilayah 7.01 km<sup>2</sup> serta elevasi 37 mdpl, Wilayah ini merupakan daerah rendah yang terletak di pesisir DAS Kapuas. Banjir yang melanda Kelurahan Mekar Jaya dapat terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, tergantung pada intensitas curah hujan di Kota Sintang. Pemukiman penduduk terus berkembang di daerah rawan banjir mencerminkan bahwa kedekatan dengan sumber air dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan potensi kerusakan dapat ditimbulkan oleh banjir.

Banjir berbahaya karena memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya dirasakan sangat meresahkan warga karena menyebabkan kerusakan dan kerugian cukup serius di berbagai sektor serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sintang. Mitigasi bencana mengacu pada segala upaya untuk mengurangi risiko bencana dan dampak bencana yang diakibatkan oleh banjir di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BPBD Kabupaten

Sintang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sebagai *leading sector* dalam urusan kebencanaan di wilayah tersebut. Sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya banjir, BPBD Kabupaten Sintang telah melaksanakan berbagai program strategis. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di sejumlah desa, pemasangan sistem peringatan dini banjir, pembangunan saluran drainase, serta kegiatan sosialisasi kebencanaan yang dilaksanakan melalui berbagai media seperti radio, media daring, surat kabar, dan melalui peran aktif satuan tugas (satgas) kecamatan dan desa.

Namun demikian, kebijakan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang tidak akan memberikan manfaat signifikan apabila tidak diiringi dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan. Implementasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan tidak hanya cukup mengklaim bahwa suatu kebijakan telah dilaksanakan, melainkan juga harus melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi di lapangan. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi risiko banjir serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kelurahan Mekar Jaya.

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sintang. Banjir besar yang terjadi pada tahun 2021 menjadi salah satu bencana paling parah dalam sejarah daerah tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan terputusnya akses transportasi utama, lumpuhnya aktivitas sosial dan ekonomi

masyarakat, ditutupnya sekolah-sekolah serta kantor-kantor pelayanan publik, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Tidak sedikit warga yang mengalami penderitaan berat, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis. Bahkan, terdapat korban jiwa akibat keterlambatan evakuasi dan keterbatasan fasilitas kesehatan selama masa bencana.

Lebih lanjut, banjir tahun 2021 menunjukkan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang masih perlu ditingkatkan. Meskipun upaya sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur tanggap darurat, termasuk lokasi pengungsian, jalur evakuasi, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas dalam penyusunan serta pelaksanaan program mitigasi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek aktif dalam setiap prosesnya.

Selain itu, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada BPBD semata, melainkan juga pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Saat ini, koordinasi antar lembaga masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal. Padahal, pengurangan risiko bencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama yang dikoordinasikan dalam kerangka kerja multi-sektor yang terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan forum koordinasi kebencanaan yang

aktif dan rutin, agar setiap program yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan dapat saling mendukung.

Kebijakan mitigasi yang berorientasi jangka panjang juga perlu memperhatikan aspek tata ruang. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur dan pemukiman seharusnya tidak lagi dilakukan di kawasan rawan banjir tanpa kajian risiko yang mendalam. Pemerintah daerah perlu menjadikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan peta risiko bencana sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan. Integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan penanggulangan bencana merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak justru meningkatkan kerentanan terhadap bencana.

Lebih lanjut menurut kepala BPBD kab Sintang Bernad Saragih yang di rilis dalam KOMPAS.com (2021).

**Tabel 1. 1 Jumlah Korban Banjir di Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Jumlah Korban (Jiwa) Terdampak
1	2021	123.936 Jiwa
2	2022	5.000 Jiwa
3	2023	597 Jiwa
4	2024	28.463 Jiwa

*Sumber* : Olahan Peneliti, Januari 2025

Jumlah korban terdampak banjir yaitu 35.652 kepala keluarga atau 123.936 jiwa. Laporan bersumber dari RT hingga lurah dan kepala desa, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni korban terdampak sebanyak 5.000 jiwa, lalu pada tahun 2023 korban sebanyak 597 jiwa, sedangkan pada tahun 2024

jumlah korban terdampak banjir meningkat kembali yaitu 9.438 keluarga atau 28.463 jiwa. Jika dilihat pada data tersebut korban banjir di Sintang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah.

Berdasarkan pada data jumlah korban bencana banjir di 4 tahun terakhir tersebut bisa dilihat bahwa, implementasi kebijakan mitigasi banjir di Kota Sintang belum berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat Kota Sintang yang terdampak akibat banjir. Belum adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan yang dibuat, dan hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, pastinya pemerintah dalam hal penanganan banjir akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan bagi masyarakat Kota Sintang yang terdampak akan mengalami banyak kerugian.

Setiap tahunnya, bencana banjir menjadi ancaman serius bagi masyarakat, dengan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang menjadi sangat krusial dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana.

Ketidakkonsistenan dalam kesiapsiagaan BPBD Sintang terlihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Salah satu permasalahan utama adalah fluktuasi anggaran dan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Alokasi dana untuk penanggulangan bencana sering mengalami perubahan berdasarkan kebijakan tahunan dan prioritas pemerintah daerah. Kondisi ini berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas program pelatihan, penyediaan peralatan darurat, serta koordinasi lintas sektor yang diperlukan dalam manajemen bencana.

Selain itu, perubahan kepemimpinan dan struktur organisasi di tubuh BPBD juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pergantian pejabat maupun restrukturisasi internal sering kali menimbulkan disrupsi terhadap kelangsungan program kerja. Ketiadaan mekanisme transisi yang baku menyebabkan banyak program penanggulangan harus dimulai dari awal atau bahkan ditinggalkan begitu saja, sehingga kontinuitas kebijakan sulit tercapai.

Masalah lain yang cukup krusial adalah kurangnya integrasi data dan informasi kebencanaan. Sistem informasi yang seharusnya mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan masih belum optimal. Informasi yang tidak terkoordinasi dengan baik dan terfragmentasi menjadikan proses identifikasi wilayah risiko tinggi menjadi tidak akurat dan lambat. Akibatnya, kebijakan dan tindakan mitigasi yang diambil sering kali tidak tepat sasaran.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan juga masih tergolong minim. Padahal, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan. Sayangnya, kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebencanaan belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Hal ini menjadikan masyarakat masih kurang paham dan siap dalam menghadapi situasi darurat banjir.

Ketidakkonsistenan respons BPBD terhadap banjir menyebabkan penanganan yang tidak optimal. Saat banjir melanda, keterlambatan dalam distribusi logistik, kurangnya tempat pengungsian yang layak, serta ketidaksiapan

tenaga relawan menjadi masalah yang berulang. Selain itu, tidak adanya dokumentasi evaluasi menyeluruh pascabencana menyebabkan kesalahan yang sama terus terulang.

Dalam beberapa kasus, masyarakat harus mengandalkan inisiatif sendiri atau bantuan dari organisasi non-pemerintah, yang sayangnya tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang. Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya sistem yang seharusnya dibangun oleh BPBD sebagai lembaga utama penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang

Upaya mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sintang hingga saat ini masih belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah. Dalam praktiknya, tindakan mitigasi yang dilakukan cenderung bersifat ad-hoc dan jangka pendek, tanpa memperhatikan kerangka kerja strategis yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemanfaatan peta risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, terbatasnya kegiatan normalisasi sungai, minimnya pembangunan infrastruktur penahan banjir seperti tanggul dan drainase, serta lemahnya integrasi antara rencana pembangunan daerah dengan upaya mitigasi risiko bencana.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berbasis risiko dan melibatkan partisipasi masyarakat. RPB seharusnya menjadi dokumen acuan utama dalam

perencanaan pembangunan lintas sektor, khususnya dalam konteks penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan penyediaan infrastruktur. Namun kenyataannya, implementasi RPB di Kabupaten Sintang masih belum optimal. Dokumen ini belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, sehingga pembangunan di wilayah rawan banjir tetap dilaksanakan tanpa analisis risiko yang memadai. Akibatnya, kerentanan masyarakat terhadap ancaman banjir semakin meningkat.

Selain itu, keterbatasan dalam hal pemetaan risiko dan data kebencanaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi yang efektif. Data yang digunakan sering kali tidak akurat atau sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi mitigasi struktural maupun non-struktural. Ketidakterediaan data spasial yang terintegrasi dengan data sosial dan ekonomi juga membuat proses perencanaan menjadi tidak berbasis bukti. Tanpa data yang kuat, setiap program mitigasi yang dijalankan berisiko tidak tepat sasaran dan berdampak rendah.

BPBD Kabupaten Sintang juga belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) yang komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan atau program mitigasi yang telah dilakukan. Tidak adanya mekanisme evaluasi berkala menyebabkan sulitnya mengukur capaian, mengidentifikasi kelemahan, maupun melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini menjadikan kebijakan mitigasi banjir

yang seharusnya berorientasi jangka panjang justru terjebak pada respons jangka pendek yang bersifat reaktif, bukan preventif.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem penanggulangan bencana yang holistik. Mitigasi bencana sejatinya memerlukan pendekatan lintas sektor dan multi-disiplin, di mana berbagai instansi memiliki peran yang saling melengkapi. Namun pada praktiknya, banyak program mitigasi berjalan sendiri-sendiri, bahkan tak jarang tumpang tindih dan tidak efisien. Tidak adanya forum koordinasi yang aktif, terstruktur, dan berkelanjutan membuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi kehilangan arah dan sinergi.

Lebih lanjut, pelibatan masyarakat dalam proses mitigasi bencana juga masih sangat minim. Sebagian besar program masih dirancang secara *top-down* tanpa partisipasi aktif dari komunitas lokal, padahal keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada keterlibatan warga sebagai aktor utama yang merasakan langsung dampaknya. Ketika masyarakat tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, maka program yang dijalankan cenderung kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Kurangnya sosialisasi, pelatihan kebencanaan, dan pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat kelurahan atau RT/RW turut menjadi indikator lemahnya pendekatan berbasis komunitas.

Padahal, pendekatan mitigasi berbasis masyarakat (*Community-Based Disaster Risk Reduction/CBDRR*) telah terbukti efektif dalam meningkatkan

ketahanan lokal terhadap bencana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara aktif memahami risiko yang mereka hadapi, serta mendorong partisipasi dalam membangun kapasitas kolektif guna melakukan tindakan preventif, kesiapsiagaan, hingga respons saat bencana terjadi. Dengan melibatkan berbagai unsur lokal seperti tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta organisasi sosial kemasyarakatan, kebijakan mitigasi menjadi lebih kontekstual, adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis setempat, serta memiliki daya jangkau yang lebih luas. Pemberdayaan masyarakat melalui CBDRR juga berperan penting dalam membangun kesadaran risiko, memperkuat modal sosial, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program kebencanaan yang dijalankan.

Namun demikian, implementasi pendekatan ini di Kabupaten Sintang, khususnya oleh BPBD, belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Program mitigasi masih didominasi oleh pendekatan top-down yang cenderung kurang menyentuh kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat akar rumput. Minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengakibatkan kurangnya efektivitas program serta rendahnya tingkat keberlanjutan pasca-intervensi. Selain itu, lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dan belum adanya mekanisme yang memastikan integrasi antara program pemerintah daerah dan inisiatif masyarakat semakin memperlebar kesenjangan antara kebijakan dengan realitas di lapangan. Oleh sebab itu, penguatan peran komunitas lokal melalui CBDRR harus menjadi prioritas dalam strategi mitigasi bencana yang lebih inklusif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut mencerminkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi banjir di Kabupaten Sintang masih memerlukan perbaikan mendasar. Aspek kelembagaan, perencanaan berbasis data, sistem koordinasi lintas sektor, serta pendekatan partisipatif terhadap masyarakat perlu diperkuat secara simultan. Ke depan, diperlukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, untuk menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah. Pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif, kemandirian, serta kemampuan dalam menghadapi dan memulihkan diri dari berbagai bentuk ancaman bencana secara berkelanjutan.

Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta alokasi anggaran yang minim menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Mekar Jaya, Kabupaten Sintang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas dasar yang seharusnya mendukung proses tanggap darurat, seperti perahu evakuasi, logistik darurat, tenda pengungsian, serta peralatan komunikasi, masih belum tersedia secara memadai. Kondisi ini menyebabkan proses evakuasi warga ketika banjir melanda menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan penyelamatan serta meningkatnya risiko terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat terdampak.

Di sisi lain, aspek sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan serius. Jumlah personel BPBD dan petugas lapangan yang terlatih dalam penanganan bencana di Kelurahan Mekar Jaya sangat terbatas. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan yang merata dan berkelanjutan. Pelatihan yang dilaksanakan biasanya hanya melibatkan sebagian kecil aparatur desa atau tokoh masyarakat tertentu, sehingga belum menciptakan kesiapsiagaan yang inklusif di tingkat komunitas. Padahal, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama dalam fase evakuasi, pertolongan pertama, dan penyelamatan korban.

Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana juga sangat terbatas. Dana yang ada umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat saat banjir sudah terjadi, seperti pembagian bantuan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, kegiatan yang bersifat preventif dan jangka panjang seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan sistem peringatan dini tidak menjadi prioritas karena keterbatasan anggaran. Padahal, pendekatan preventif terbukti jauh lebih efisien dan berkelanjutan dalam mengurangi dampak bencana dibandingkan dengan penanganan pasca-bencana.

Ketidaksiapan infrastruktur pendukung di Kelurahan Mekar Jaya juga memperparah kondisi ketika banjir terjadi. Akses jalan utama yang sering terendam air dan tidak dapat dilalui kendaraan menjadi hambatan besar dalam proses distribusi bantuan dan mobilisasi tim penyelamat. Selain itu, belum adanya sistem

drainase yang memadai mempercepat genangan air dan memperlambat surutnya banjir. Fasilitas pengungsian yang ada pun tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kapasitas, kebersihan, maupun fasilitas pendukung seperti air bersih dan sanitasi. Akibatnya, warga yang mengungsi kerap tinggal dalam kondisi yang tidak layak, rentan terhadap penyakit, serta mengalami tekanan psikologis yang tinggi.

Lebih jauh, rendahnya literasi kebencanaan di kalangan masyarakat turut menjadi kendala tersendiri. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai risiko banjir serta tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi menyebabkan banyak warga tidak siap menghadapi situasi darurat. Beberapa warga bahkan tidak mengetahui prosedur evakuasi atau lokasi pengungsian yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi program pendidikan kebencanaan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, baik melalui sekolah, kelompok ibu-ibu, karang taruna, maupun forum warga.

Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya penanggulangan bencana di Kelurahan Mekar Jaya belum mampu menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu secara serius meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, bukan hanya untuk kebutuhan darurat, tetapi juga untuk kegiatan mitigasi jangka panjang. Selain itu, pelatihan SDM harus ditingkatkan baik dalam kualitas maupun cakupan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif.

Kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan internasional juga dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat kapasitas lokal. Melalui kemitraan ini, Kelurahan Mekar Jaya dapat memperoleh akses terhadap teknologi, pendanaan tambahan, serta inovasi dalam manajemen risiko bencana. Penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan pemetaan risiko secara partisipatif juga penting untuk meminimalkan dampak banjir dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan melibatkan banyak pihak, penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Mekar Jaya diharapkan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan kajian mendalam, kemudian dijelaskan dalam tulisan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Kesiapsiagaan BPBD serta respon terhadap bencana banjir mengalami perubahan dan ketidakstabilan dari tahun ke tahun, sehingga tidak konsisten dalam upaya penanganan dan pencegahan.

- 1.2.2 Upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sintang belum sesuai dengan kebijakan.
- 1.2.3 Keterbatasan sarana & prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, terbatasnya anggaran, serta infrastruktur belum memadai menyebabkan kesulitan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan dan tidak langsung jadi mempengaruhi kualitas penanggulangan bencana di kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini berfokus pada Impementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini berikut: Bagaimana proses implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui & mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan & dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu administrasi publik terkait Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi Masyarakat Terdampak Banjir Tahun 2021 di Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dalam melatih keterampilan mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuannya pada pengetahuan yang diperoleh dari ilmu administrasi publik FISIP Untan. Dari hasil penelitian diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan antara BPBD kepada masyarakat dengan tepat dan cepat, serta diharapkan dengan penelitian ini akan dapat menumbuhkan atau menciptakan kerjasama lebih baik antar instansi terkait.